



PEMERINTAH KOTA DUMAI

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA DUMAI**



PEMERINTAH KOTA DUMAI

INTRODUCTION

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) harus disusun setelah suatu instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Secara umum perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Pernyataan Perjanjian Kinerja
Pernyataan PK ini paling tidak terdiri atas:
 - a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu
 - b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
- 2) Lampiran Perjanjian Kinerja.
Lampiran PK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen PK. Informasi yang disajikan dalam lampiran PK disesuaikan dengan tingkatnya.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- 2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- 3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Dumai disusun mempedomani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 seri A) dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 15 seri A).



PEMERINTAH KOTA DUMAI

PK PEJABAT ESELON II

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. RIKI DWI WORO, M.Si**

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KOTA DUMAI

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023



Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS



Pihak Pertama,

Drs. RIKI DWI WORO, M.Si

NIP. 19730929 199303 1 003

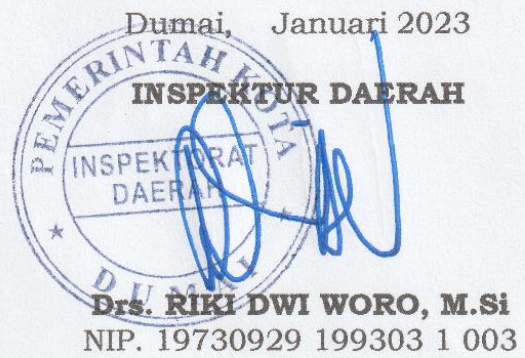
Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3
	Level Kapabilitas APIP	Level	3
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	%	95
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	%	95
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	%	100
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	%	100

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.985.456.265,-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 61.259.100,-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.124.789.752,-
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 154.431.800,-
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 191.850.000,-
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 648.529.613,-
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 197.346.000,-
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 274.400.000,-
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 332.850.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.466.283.100,-
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 1.322.283.100,-
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 144.000.000,-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 394.746.355,-

3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp.	114.052.000,-
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Rp.	280.694.355,-





PK PEJABAT ESELON III

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI



PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RESIANA, S.STP, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

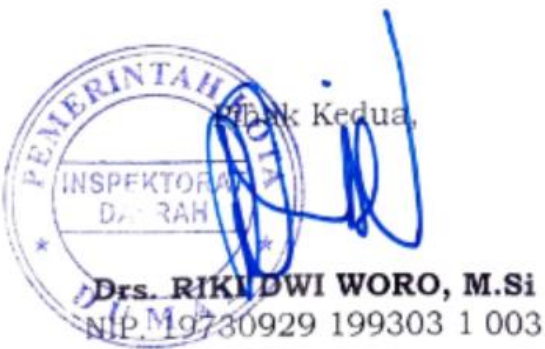
Nama : **Drs. RIKI DWI WORO, M.Si**

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
NIP. 19730929 199303 1 003

Dumai, 03 Februari 2023

Pihak Pertama,

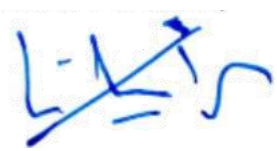

RESIANA, S.STP, M.Si
NIP. 19760711 199612 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan unsur pengawasan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11.985.456.265,-
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.259.100,-
1.2	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.124.789.752,-
1.3	Tersedianya laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 laporan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	154.431.800,-
1.4	Terfasilitasinya penyelenggaraan IHT dan PKS serta keikutsertaan APIP dalam diklat-diklat teknis maupun penjenjangan untuk meningkatkan kapasitas APIP	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	55 orang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	191.508.000,-
1.5	Terselenggaranya pelayanan umum perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 laporan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	648.529.613,-
1.6	Tersedianya peralatan dan mesin pendukung pelaksanaan unsur pengawasan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan	7 unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	197.346.000,-
1.7	Tersedianya jasa penunjang pelaksanaan unsur pengawasan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	1 laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.400.000,-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.8	Terpeliharanya aset perangkat daerah penunjang pelaksanaan unsur pengawasan	Jumlah barang milik Perangkat Daerah yang dipelihara	62 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.850.000,-
2.	Terselenggaranya pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	46%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.012.151.200,-
2.1	Terselenggaranya pengawasan internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	50 laporan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	983.071.200,-
2.2	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 laporan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	29.080.000,-
3.	Tersusunnya kebijakan teknis	Persentase Perumusan Kebijakan	50%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	62.852.000,-
3.1	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	1 rekomendasi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	62.852.000,-


Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
NIP. 19730929 199303 1 003

Dumai, 03 Februari 2023
Sekretaris,

RESIANA, S.STP, M.Si
NIP. 19760711 199612 2 001



PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HAMOD ISSFAD, S.Pi, M.Si**

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

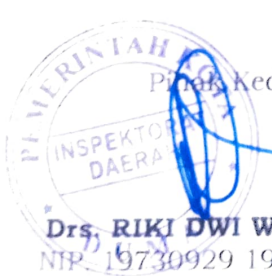
Nama : **Drs. RIKI DWI WORO, M.Si**

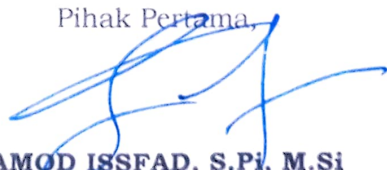
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
NIP. 19730929 199303 1 003

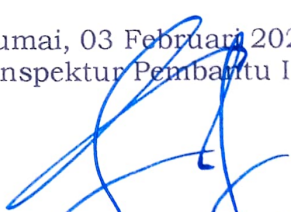
Dumai, 03 Februari 2023
Pihak Pertama,

HAMOD ISSFAD, S.Pi, M.Si
NIP. 19740211 200003 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Terselenggaranya pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	39%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	339.211.900,-
1.1	Terselenggaranya pengawasan internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	43 laporan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	339.211.900,-
1.1.1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	42 laporan	Reviu Laporan Kinerja	299.224.100,-
1.1.2	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	Reviu Laporan Keuangan	39.987.800,-
2.	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	21,6%	-	0,-
3.	Terlaksananya pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	16,9%	-	0,-

INSPEKTUR,

Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
NIP. 19730929 199303 1 003

Dumai, 03 Februari 2023
Inspektur Pembantu I,

HAMOD ISSFAD, S.Pi, M.Si
NIP. 19740211 200003 1 005



PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TRI MARLINA KURNIA PUTRI, SE**
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. RIKI DWI WORO, M.Si**
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
NIP. 19730929 199303 1 003

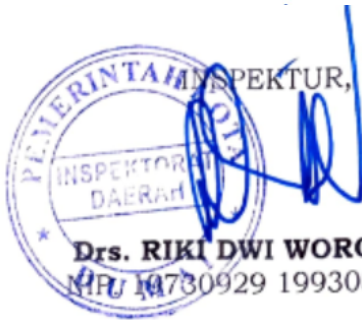
Dumai, 03 Februari 2023

Pihak Pertama,


TRI MARLINA KURNIA PUTRI, SE
NIP. 19790308 200212 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	121.827.800,-
2.	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	21,6%	-	0,-
3.	Terlaksananya pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	25,4%	-	0,-


Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
NIP. 19730929 199303 1 003

Dumai, 03 Februari 2023
Inspektur Pembantu II,


TRI MARLINA KURNIA PUTRI, SE
NIP. 19790308 200212 2 003



PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

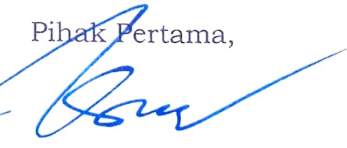
Nama : **RIZAL, S.Sos**
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU III
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. RIKI DWI WORO, M.Si**
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
NIP. 19730929 199303 1 008

Dumai, 03 Februari 2023
Pihak Pertama,

RIZAL, S.Sos
NIP. 19720523 200312 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi	80%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	140.866.555,-
1.1	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Jumlah Laporan	80%	Pendampingan dan Asistensi	140.866.555,-
1.1.1	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	74.730.000,-
1.1.2	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Perangkat Daerah	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	66.136.555,-
2.	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	21,6%	-	0,-
3.	Terlaksananya pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	14,6%	-	0,-


Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
 NIP. 19730929 199303 1 003

Dumai, 03 Februari 2023
 Inspektur Pembantu III,

RIZAL, S.Sos
 NIP. 19720523 200312 1 002



PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

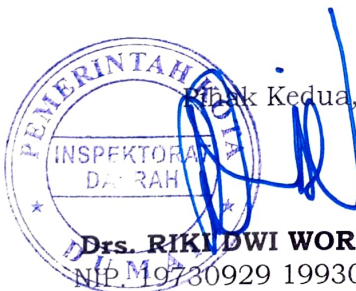
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

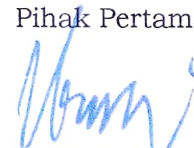
Nama : **AMRI, S.Sos**
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU V
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***.

Nama : **Drs. RIKI DWI WORO, M.Si**
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

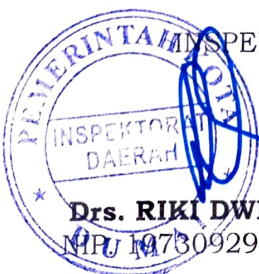
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
NIP. 19730929 199303 1 003

Dumai, 03 Februari 2023
Pihak Pertama,

AMRI, S.Sos
NIP. 19760524 200112 1 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Terselenggaranya pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	15%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	114.920.000,-
1.1	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16 laporan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	114.920.000,-
1.1.1	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 laporan	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	114.920.000,-
2.	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	13,5%	-	0,-
3.	Terlaksananya pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	19,2%	-	0,-
4.	Terlaksananya pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli	Persentase pelaksanaan pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli	100%	-	0,-

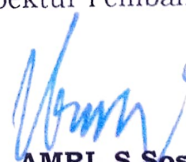


INSPEKTUR,

Drs. RIKI DWI WORO, M.Si

NIP. 19730929 199303 1 003

Dumai, 03 Februari 2023
Inspektur Pembantu V,



AMRI, S.Sos

NIP. 19760524 200112 1 016



PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYARIFAH SUSILAWATY, SKM**
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU IV
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. RIKI DWI WORO, M.Si**
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Februari 2023

Pihak Pertama,

SYARIFAH SUSILAWATY, SKM
NIP. 19770928 200904 2 001

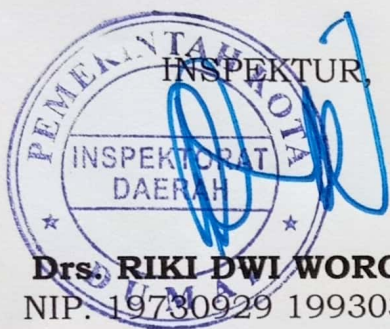
Pihak Kedua,

Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
NIP. 19730929 199303 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

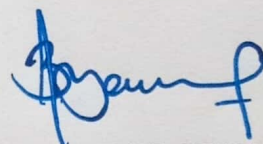
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Tersusunnya kebijakan teknis	Persentase Perumusan Kebijakan	50%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	51.200.000,-
1.1	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	1 rekomendasi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	51.200.000,-
1.1.1	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	51.200.000,-
2.	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi	20%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	18.000.000,-
2.1	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	3 Perangkat Daerah	Pendampingan dan Asistensi	18.000.000,-
2.1.1	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Perangkat Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000,-
3.	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	21,6%	-	0,-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
4.	Terlaksananya pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	23,8%	-	0,-



Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
 NIP. 19730929 199303 1 003

Dumai, 03 Februari 2023
 Inspektur Pembantu IV,


SYARIFAH SUSILAWATY, SKM
 NIP. 19770928 200904 2 001



PEMERINTAH KOTA DUMAI

PK PEJABAT ESELON IV

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI



PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TENGKU ARIFAH, S.Sos**
Jabatan : KASUBBAG. ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***.

Nama : **RESIANA, S.STP, M.SI**
Jabatan : SEKRETARIS
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Maret 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

RESIANA, S.STP, M.SI
NIP. 19760711 199612 2 001

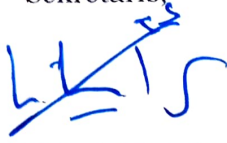
TENGKU ARIFAH, S.Sos
NIP. 19840122 201001 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.124.789.752,-
2.	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	0,-
3.	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	1 laporan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,-
4.	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	154.431.800,-
5.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	191.850.000,-
6.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	14.738.095,-
7.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	119.091.998,-
8.	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	2 paket	Penyediaan peralatan rumah tangga	22.930.000,-
9.	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	2 paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.939.100,-
10.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 paket	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90.086.420,-
11.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.988.000,-
12.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.756.000,-

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
13.	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,-
14.	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.138.000,-
15.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,-
16.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.400.000,-
17.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.680.000
18.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.480.000
19.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.690.000
20.	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian	Jumlah pelaksanaan penataan administrasi kepegawaian	10 bulan	-	0,-
21.	Tersusunnya Kebijakan teknis terkait Tugas dan Fungsi		10 bulan	-	0,-

Sekretaris,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RESIANA' with a stylized flourish at the end.

RESIANA, S.STP, M.SI
NIP. 19760711 199612 2 001

Dumai, Maret 2023
Kasubbag. Adm. Umum dan Keuangan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'TENGKU ARIFAH' with a long horizontal stroke at the beginning.

TENGKU ARIFAH, S.Sos
NIP. 19840122 201001 2 007



PEMERINTAH KOTA DUMAI

PK PEJABAT FUNGSIONAL

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI



PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURDIANA LINDAYANI SIREGAR, ST, M.Eng**

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **RESIANA, S.STP, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Februari 2023

Pihak Kedua,

RESIANA, S.STP, M.Si
NIP. 19760711 199612 2 001

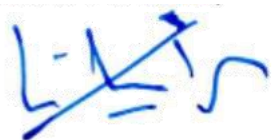
Pihak Pertama,

NURDIANA LINDAYANI S., ST, M.Eng
NIP. 19840220 201001 2 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,-
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,-
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,-
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,-
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0,-
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,-
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.259.100,-
8.	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 laporan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	99.900.000,-
9.	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	45 laporan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	608.700.000,-
10.	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	62.852.000,-

SEKRETARIS,



RESIANA, S.STP, M.Si
NIP. 19760711 199612 2 001

Dumai, 03 Februari 2023
Perencana Ahli Muda,



NURDIANA LINDAYANI S., ST, M.Eng
NIP. 19840220 201001 2 021



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MEGA KURNIA WULANDARI, S.STP**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **RESIANA, S.STP, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,


RESIANA, S.STP, M.Si
NIP. 19760711 199612 2 001

Pihak Pertama,


MEGA KURNIA WULANDARI, S.STP
NIP. 19900208 201010 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Yang Disusun	1 Konsep	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi/Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-
2.	Terselenggaranya pengawasan penanganan penyelesaian kerugian daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	Program Penyelenggaraan Pengawasan/Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	29.080.000,-
3.	Terselenggaranya pengawasan internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	Program Penyelenggaraan Pengawasan/Penyelenggaraan Pengawasan Internal	274.471.200,-

SEKRETARIS,



RESIANA, S.STP, M.Si
NIP. 19760711 199612 2 001

Dumai, 02 Januari 2023
Analisis Kebijakan Ahli Muda,



MEGA KURNIA WULANDARI, S.STP
NIP. 19900208 201010 2 001